

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Ali, Zainuddin, 2021, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Setjen & Kepaniteraan MK RI
- Budiardjo, Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen BPSDM, Tri Wahyuni, 2020, *Rangkap Jabatan : Batas Antara Hukum dan Etika Dalam Penyelenggaraan Pemerintah*, Policy Paper
- Huda, Ni'matul Huda, 2014, *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jamaluddin, Y., Nizhamul, N., & Pasha, S, 2025, *Birokrasi dan Governansi Publik*. CV Eureka Media Aksara : Jakarta
- Muin, F., Judijanto, L., Dani, R., Irhamdessetya, H., Setiyono, S., Shebubakar, A. N., & Nursyam, A. R. 2026, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia: Jakarta
- Negara, L. A. 2014. Handbook inovasi administrasi negara. *Jakarta: LAN*.
- Permatasari, T., Hijroti, Z., Aulia, N., Millah, S., Putri, D. R., & Amali, A. F. 2025, *Sejarah Perkembangan Demokrasi Dan Pelembagaan Demokrasi*. Penerbit: Kramantara JS: Jakarta
- Prasojo, 2023, E. *Isu-isu kontemporer kebijakan dan governansi publik di Indonesia*, Prenada Media : Jakarta
- Ridwan, I. H. J., & Sudrajat, M. A. S. 2020, *Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik*. Nuansa Cendekia : Jakarta
- Siregar, M. B., Haruni, C. W., & Anoraga, S. (2021). Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Yang Berasal Dari Unsur Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Indonesia Law Reform Journal*, 1(1)
- Suteki dan Galang Taufani. 2018. Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik), Depok: Rajawali Pers
- Tarigan, R. S. 2024. *Reformasi hukum tata negara: Menuju keadilan dan keseimbangan*. Ruang Berkarya: Jakarta

b. Peraturan dan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 61 Tahun 2024 atas perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025

c. Jurnal

Ali, N., & Rozi, S. Z. R, 2026, Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik sebagai Pilar Demokrasi di Indonesia. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 5(01)

Arini, Dita Rosalia, 2022, “Pengaturan Terhadap Rangkap Jabatan Sebagai Menteri Sekaligus Pemimpin Daerah Dalam Pandangan Politik Hukum Indonesia,” *Jurnal Syntax Imperatif* 3, no. 2 (2022)

Awatra, Meizar Arya, 2024, *Rangkap Jabatan Menteri Kabinet Indonesia Maju Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Perspektif Siyasah Dusturiyah*.

Gunawan, Wahyu, 2018, “Kekuasaan dan Mekanisme Pengangkatan Menteri Pada Sistem Presidensiil Di Indonesia” *Jurnal Jurist-Diction* Vol.I, No. 1, (September, 2018)

Hakim, H. 2022. Sinergi Antara Good Government Dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (Aaupb) Dalam Upaya Pencegahan Korupsi. *DIALEKTIKA: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 7(2)

Ismuhadi, K. Tinjauan yuridis terhadap rangkap jabatan menteri atau wakil menteri sebagai komisariss BUMN perspektif fiqh siyasah.

Lubis, F., Fathona, C., & Della Safitri Harahap, H. A. (2026). Rangkap Jabatan Dan Konflik Kepentingan Advokat: Analisis Normatif Terhadap Etika Kepemimpinan Profesi. *Jurnal l Pendidikan Masyarakat Indonesia Harapan*, 2026(2026).

Pramesthi, Ida Ayu Intan, 2025, “Pengaturan Pegawai Negeri Sipil Yang Merangkap Jabatan Sebagai Komisariss Badan Usaha Milik Negara

Pratama, W. D. (2025). Analisis Yuridis Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Sebagai Komisariss BUMN Berdasarkan Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025 Perspektif Siyasah Dusturiyah. *Jurnal Hukum Sasana*, 11(1)

- Rahmania, A., & Umam, M. K, 2025, Implikasi Terhadap Normatifisasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak terhadap Praktik Administrasi Pemerintahan. *Journal of Dual Legal Systems*, 2(2)
- Ramadhan, Febriansyah, 2025, “Konstitusionalitas Rangkap Jabatan Wakil Menteri,” *Hukumonline*, 1 September 2025,
- Ratnasyifa, O. R. (2024). Konstitusi Pemisahan Kekuasaan menurut Polybius. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(02).
- Saputra, A. A., Fallah, M. A. B., Indranarwasti, V. P., & Kosasih, Y. A. B. (2024). Analisis regulasi larangan rangkap jabatan dalam pemerintahan Indonesia sebagai dukungan penerapan Good Corporate Governance. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(14)
- Siregar, M. B., Haruni, C. W., & Anoraga, S. (2021). Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Yang Berasal Dari Unsur Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Indonesia Law Reform Journal*, 1(1)
- Solechan, S. 2019. Asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(3)